

**PBMT VENTURA DALAM SISTEM LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
SYARI'AH DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA BMT ALFA DINAR
KARANGANYAR)**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER EKONOMI DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**FAUZIA ULIRRAHMI, S.Sy
NIM: 1520311016**

PEMBIMBING:

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA, DCL

**HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fauzia Ulirrahmi, S.Sy
NIM : 1520311016
Program studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 1 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Fauzia Ulirrahmi

Fauzia Ulirrahmi, S.Sy
NIM 1520311016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fauzia Ulirrahmi, S.Sy

NIM : 1520311016

Program studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 April 2017

Saya yang menyatakan,



Fauzia Ulirrahmi

Fauzia Ulirrahmi, S.Sy

NIM 1520311016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-173/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : "PBMT VENTURA DALAM SISTEM LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA BMT ALFA DINAR KARANGANYAR)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAUZIA ULIRRAHMI, S.Sy
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311016
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji I

Dr. H. Abdul Majib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 17 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada YTH.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb,

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PBMT VENTURA SEBAGAI PENGUAT LIKUIDITAS (STUDI KASUS
POLA KERJASAMA PBMT VENTURA DAN BMT ALFA DINAR
KARANGANYAR)**

Yang ditulis oleh :

Nama	:	Fauzia Ulirrahmi, S.Sy
NIM	:	1520311016
Prodi	:	Magister Hukum Islam
Konsentrasi	:	Hukum Bisnis Syari'ah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb,

Yogyakarta, 2 Mei 2017
Pembimbing,



Prof.Drs. H. Ratno Lukito, MA, DCL
NIP. 19680322 199303 1 001

MOTTO

مَنْ كَانَ مُفْتَخِرًا بِالْمَالِ وَالنَّسَبِ
فَإِنَّمَا فَخْرُنَا بِالْعِلْمِ وَالْأَدَبِ

"Barangsiapa yang berbangga-bangga dengan harta kekayaan dan nasabnya, maka kebanggaan kami hanyalah dengan ilmu dan budi pekerti yang mulia"

-Abu Al-'Atāhiyah (211H)-

ABSTRAK

BMT berada pada risiko likuiditas yang sangat rentan karena karakteristik anggota atau nasabah pendanaan (simpanan) yang dominan dari sektor usaha mikro-kecil, dimana perilaku usahanya masih erat hubungannya dengan perilaku ekonomi keluarga. Hal ini tentu akan menimbulkan risiko likuiditas yang tinggi bagi BMT. Keberadaan PBMT Ventura sebagai penguat likuiditas sangat membantu permasalahan tersebut, namun posisi PBMT Ventura dalam LKMS dan pola kerjasama antara PBMT Ventura dengan BMT mitra nya harus dikaji lebih lanjut, untuk mengetahui apakah pola perjanjian tersebut sudah dapat melindungi kepentingan kedua belah pihak secara berimbang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yang menggunakan data primer dan sekunder. Objek dalam penelitian ini adalah PBMT Ventura dan BMT Alfa Dinar Karanganyar. Adapun responden dari penelitian ini adalah Pimpinan dan Direksi PBMT Ventura serta Dewan Pengurus BMT Alfa Dinar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dan analisis datanya menggunakan metode induktif induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *Pertama* Posisi PBMT Ventura dalam sistem Lembaga Keuangan Mikro Syariah jika ditinjau dari struktur hukum maka PBMT Ventura berada dibawah naungan OJK, Kementrian Koperasi, DSN-MUI, Dewan Pengawas Syariah, dan PBMT Indonesia. Jika ditinjau dari substansi hukum maka yang menjadi landasan berdirinya PBMT Ventura adalah segala UU terkait Perusahaan Modal Ventura dan UU terkait BMT, khususnya UU Koperasi No 25 Tahun 1992 Pasal 41 ayat 2, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 30/PER/M.UKM/VIII/2007 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Lembaga Keuangan dengan Penyediaan Modal Awal dan Pendanaan melalui Modal Ventura, UU No 1 Tahun 2013 Pasal 14 tentang Lembaga Keuangan Mikro, UU No 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura. Sedangkan jika ditinjau dari budaya hukum, PBMT Ventura telah menciptakan budaya hukum pembiayaan modal ventura yang baik diantaranya pola pengawasan dan pembinaan yang dilakukan PBMT Ventura secara aktif kepada BMT mitranya, PBMT Ventura berusaha memenuhi rukun dan syarat sah akad syariah dalam perjanjian yang dilakukan, PBMT Ventura menitikberatkan analisis permohonan pembiayaan bukan hanya pada kemampuan bayar dan jaminan namun juga berdasarkan analisis usaha yang menjadikan pembiayaan sarat dengan nilai investasi dan bukan utang piutang, dan keberadaan *avalist* bukan hanya sebagai penjamin dalam perjanjian, namun juga merupakan salah satu upaya PBMT Ventura berkenaan dengan akad *mudharabah muqayyadah* yang tidak mewajibkan adanya jaminan. Dengan keberadaan PBMT Ventura, LKMS dapat semakin meneguhkan perannya memperkuat perekonomian nasional karena semakin banyak UMKM yang mendapat saluran permodalan dan pembiayaan, sehingga tenaga kerja terserap semakin baik, pengangguran berkurang, stabilitas ekonomi terjaga, dan mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat. *Kedua*, pola kerjasama (akad) antara PT. Permodalan BMT Ventura dengan BMT Alfa Dinar Karanganyar sudah dapat melindungi kepentingan kedua belah pihak secara berimbang. Kewajiban-kewajiban yang diterapkan kepada pihak Alfa Dinar dikarenakan akad pembiayaan antara keduanya merupakan akad yang *high risk*. Namun, kompensasi berupa hak dan manfaat yang dirasakan oleh BMT Alfa Dinar juga sebanding dengan kewajiban yang harus ia penuhi.

Kata Kunci : PBMT Ventura, likuiditas, pola kerjasama.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Penulisan Konsonan

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	<i>alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	<i>bā'</i>	b	b
3	ت	<i>tā'</i>	t	t
4	ث	<i>ṣa'</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
5	ج	<i>jīm</i>	j	je
6	ح	<i>ḥa</i>	ḥa	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	<i>kha</i>	kh	ka dan ha
8	د	<i>dāl</i>	d	d
9	ذ	<i>dzāl</i>	z	dz
10	ر	<i>rā'</i>	r	r
11	ز	<i>zai</i>	ẓ	zet
12	س	<i>sīn</i>	s	es
13	ش	<i>syīn</i>	sy	es dan ye
14	ص	<i>ṣad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15	ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik dibawah)
16	ط	<i>ṭa'</i>	ṭ	te (dengan titik dibawah)
17	ظ	<i>ẓa'</i>	ẓ	zet (dengan titik dibawah)

18	ع	<i>‘ain</i>	‘	koma terbaik di atas
19	غ	<i>ghain</i>	g	ge
20	ف	<i>fā’</i>	f	ef
21	ق	<i>qāf</i>	q	qi
22	ك	<i>kāf</i>	k	ka
23	ل	<i>lām</i>	l	el
24	م	<i>mīm</i>	m	em
25	ن	<i>nūn</i>	n	en
26	و	<i>wawu</i>	w	we
27	ه	<i>hā’</i>	h	ha
28	ء	<i>hamzah</i>	‘	apostrof
29	ي	<i>yā’</i>	y	ye

B. Penulisan vokal rangkap

1	متعقدين	ditulis	muta‘aqqidīn
2	عدة	ditulis	‘iddah

C. Penulisan *Ta’ul-Marbuthah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dhammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لإن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qura'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

السماء	ditulis	ṣawī al-furūd
الشمس	ditulis	ahl as-sunnah

PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN KARYA INI UNTUK KALIAN:

Tulus Cinta dan Kasih yang Selalu Memeluk Ananda dengan Do'a
"Bapak dan Ibu"

Wahai Dunia dan Akhiratku
"Afnan Arummi"

Penerus Perjuangan dan Pelipur Laraku
"Ghassan Syauqil Jinan Arummi"
"Ghazi Althaf Fuadi Arummi"

Saudara Serahim, Sedarah, Sedaging, dan Secinta
"Rifka Rahma Wardati"
"Itsna Nurrahma Miladaeni"
"Fahmi Humaidi Abdillah"

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, sang Tuhan yang Maha Hebat, yang menciptakan seluruh alam dan seisinya, yang menjadikan manusia sebagai *khalifah* di muka bumi, yang Maha Tahu atas segala hal, yang dari pada-Nya semua ilmu berasal, dan kepada-Nya kita semua dikembalikan. Atas rahmat-Nya pulalah, penulis dapat menyelesaikan dan dapat melewati segala hambatan-hambatan dalam menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah *Shalla'l-lāhu 'alaihi wa ālihi wa sallam*, para sahabat, para *tābi' tābi'in* dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman.

Penelitian ini tidak akan dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan penuh kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya penelitian ini.

1. Bapak Prof. Drs. KH.Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Muhammad Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M. Hum., selaku Kaprodi Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA, DCL selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, koreksi, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT mempermudah setiap langkah perjuangan beliau dan melimpahkan hidup beliau sekeluarga dengan keberkahan.
5. Bapak Dr. H.Abdul Mujib, M.Ag selaku dosen metode penelitian dan proposal tesis yang memberikan motivasi untuk tetap melanjutkan penelitian ini dengan semangat dan tanpa putus asa.
6. Para dosen tercinta, yang hebat dan tak kenal lelah mendidik kami.
7. Al-Ustadz KH. Dr.Ahmad Hidayatullah Zarkasyi, M.A. dan Al-Ustadz KH. Sutadji Tajuddin, M.A., terima kasih telah menanamkan jiwa keikhlasan,

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Namun demikian, semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu ekonomi Islam pada khususnya.

Yogyakarta, 2 Mei 2017

Penulis,

A handwritten signature in black ink, reading 'Fauzia Ulirrahmi'. The signature is written in a cursive style with a long horizontal flourish at the end.

(Fauzia Ulirrahmi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR BAGAN	xix
DAFTAR DIAGRAM	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	28

BAB II TINJAUAN UMUM LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH (LKMS)

A. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS)	30
1. Pengertian dan Fungsi LKMS (BMT)	30
2. Konsep Akad dalam LKMS (BMT)	36
3. Asas-Asas Dalam Akad Syari'ah pada LKMS (BMT)	40

B. Peraturan yang Mengatur LKMS (BMT).....	44
1. Peraturan tentang Kelembagaan LKMS (BMT)	44
2. Peraturan tentang Operasional LKMS (BMT).....	48
C. Kontrak Bisnis pada LKMS (BMT).....	52
1. Pengertian Perjanjian Kemitraan.....	52
2. Akad-Akad Syari'ah dalam Perjanjian Kemitraan.....	55
3. Keseimbangan dan Proporsionalitas dalam Kontrak.....	60
4. Perjanjian Baku.....	62
5. Hukum Jaminan.....	65
6. Wanprestasi, Keadaan Memaksa, dan Risiko	67

BAB III PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARI'AH DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

A. Perusahaan Modal Ventura Syari'ah.....	73
1. Pengertian, Karakteristik, dan Dasar Hukum.....	73
2. Perkembangan Modal Ventura Syari'ah di Indonesia	83
B. PT. Permodalan BMT Ventura (PBMT Ventura).....	85
1. Sejarah PBMT Ventura	85
2. Profil Perusahaan.....	87
3. Visi, Misi, dan Tujuan.....	90
4. Keyakinan Inti dan Budaya Perusahaan.....	91
5. Produk-Produk di PBMT Ventura.....	91
6. Struktur Organisasi.....	93
7. Pertumbuhan Aset	94
8. Sumber Dana	95
9. Penerima Manfaat.....	95
10. Infrastruktur Jaringan	97

C.	Hubungan Kemitraan PBMT Ventura dengan BMT Alfa Dinar Karanganyar	
1.	Profil BMT Alfa Dinar Karanganyar.....	100
2.	Praktek Pola Kerjasama antara PBMT Ventura dengan BMT Alfa Dinar Karanganyar	103
BAB IV	POSISI PBMT VENTURA DALAM SISTEM LKMS DAN POLA KERJASAMA PBMT VENTURA DENGAN BMT ALFA DINAR KARANGANYAR	
A.	Posisi PBMT Ventura dalam Sistem LKMS.....	119
B.	Pola Kerjasama antara PBMT Ventura dengan BMT Alfa Dinar Karanganyar	130
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	141
B.	Saran.....	143
	DAFTAR PUSTAKA	145
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL:

Tabel 1	Ketentuan Teori Pertukaran	22
Tabel 2	Ketentuan Teori Percampuran	24
Tabel 3	Perbedaan antara <i>Musyarakah</i> dan <i>Mudharabah</i>	58
Tabel 4	Penerima Manfaat PBMT Ventura	96
Tabel 5	Klausula dan Pasal Perjanjian PBMT Ventura dan BMT Alfa Dinar ditinjau dari Persyaratan Minimum Akad <i>Mudharabah</i>	134
Tabel 6	Kewajiban para Pihak dalam Perjanjian	136

DAFTAR BAGAN :

Bagan 1	: Pertukaran ' <i>Ayn bi 'Ayn</i>	18
Bagan 2	: Pertukaran ' <i>Ayn bi Dayn</i>	19
Bagan 3	: Pertukaran <i>Dayn bi Dayn</i>	21
Bagan 4	: Ikhtisar Teori Pertukaran	21
Bagan 5	: PBMT Indonesia dan LKMS/BMT	122
Bagan 6	: Struktur Hukum PBMT Ventura	125

DAFTAR DIAGRAM :

Diagram 1	: Pertumbuhan Aset PBMT Ventura	94
Diagram 2	: Sumber Dana PBMT Ventura	95
Diagram 3	: Sebaran Manfaat PBMT Ventura	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi bangsa selalu membutuhkan eksistensi lembaga keuangan. Dengan keberadaan lembaga keuangan, masyarakat dapat mengembangkan usaha atau memanfaatkan sebagai wadah investasi, untuk kemudian investasi tersebut dimanfaatkan lembaga keuangan kembali untuk menghidupkan kegiatan usaha yang lain. Memanfaatkan lembaga keuangan secara optimal berarti menumbuhkembangkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik. Namun, akses pembiayaan dalam lembaga keuangan bank tidak selamanya mudah diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat penggerak ekonomi mikro mencari sumber dana pada lembaga keuangan mikro (LKM) yang lebih fleksibel.

Salah satu model LKM yang berkembang pesat adalah LKM Syari'ah atau biasa disebut *baitu al māl wa at-tamwīl* (selanjutnya disebut BMT). BMT dianggap dapat menjembatani kebutuhan UMKM secara lebih aman dan menentramkan karena dijalankan dengan prinsip kerjasama berdasarkan akad-akad syari'ah. Namun, sebagai lembaga yang berkontribusi cukup besar dalam perekonomian nasional dengan perannya menghidupkan UMKM, bukan berarti BMT bebas dari permasalahan. Masalah klasik yang dihadapi BMT adalah terbatasnya akses terhadap perbankan sebagai salah satu sumber permodalan terpenting. Selain itu, BMT juga berada pada risiko likuiditas yang sangat rentan karena karakteristik anggota atau nasabah pendanaan (simpanan) yang dominan

dari sektor usaha mikro-kecil, dimana perilaku usahanya masih erat hubungannya dengan perilaku ekonomi keluarga. Masyarakat usaha mikro-kecil relatif memiliki perilaku yang homogen dalam pengelolaan dana mereka. Misalnya karena tahun ajaran baru atau hari besar keagamaan banyak anggota yang menarik dana mereka dari BMT secara bersamaan, hal ini tentu akan menimbulkan risiko likuiditas yang tinggi bagi BMT.¹

Berangkat dari kebutuhan tersebut, PBMT Indonesia telah mendirikan dan mengoperasionalkan sebuah badan usaha yang antara lain bertujuan memelihara dan memperkuat permodalan dan likuiditas lembaga keuangan mikro syariah yaitu PT.Permodalan BMT Ventura (selanjutnya PBMT Ventura). Seperti yang sudah berjalan, kesulitan likuiditas BMT dominan diatasi oleh pemilik BMT (42,81 persen). Selain itu pihak yang membantu kebutuhan likuiditas ini adalah BMT lain melalui asosiasi lokal (23,64 persen) dan pinjaman dari bank syariah (11,50 persen). Sementara itu, peran pemerintah sejauh ini masih dirasakan minim, hanya sebesar 3,19 persen. Khusus untuk BMT di Jawa Tengah, selama ini asosiasi lokal, Puskopsyah Jawa Tengah telah memainkan peran dengan baik sebagai pihak yang membantu kebutuhan likuiditas BMT (40,24 persen). Dana yang Puskopsyah Jawa Tengah miliki pada dasarnya merupakan iuran dari para anggota (BMT).²

Secara umum, PBMT Ventura melakukan pelayanan jasa keuangan bagi usaha mikro kecil dan menengah melalui jaringan BMT. Di awal berdirinya, yaitu

¹ Ali Sakti, "Pemetaan Kondisi dan Potensi BMT, Kemitraan dalam rangka Memperluas Pasar & Jangkauan Pelayanan Bank Syariah kepada Usaha Mikro", Jurnal al-Muzara'ah, Vol. I, No. 1, 2013, hlm 11.

² *Ibid.*

di tahun 2007, PBMT Ventura berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar Rp3.576.710.198,00 (Tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta, tujuh ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) dan pada akhir tahun 2014, PBMT Ventura telah berhasil menyalurkan pembiayaan hingga Rp181.817.459.114,00 (seratus delapan puluh satu milyar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah).³

Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan PBMT Ventura sangat strategis sehingga BMT lain dapat sangat terbantu dalam menangani masalah yang berkaitan dengan modal ataupun penguatan likuiditas. PBMT Ventura juga berdiri sebagai lembaga *linkage*, yang menyalurkan pembiayaan dari pihak ketiga (perbankan atau investor) dimana selama ini baik perbankan maupun investor kesulitan mendapatkan data tentang BMT yang standard dan layak untuk mendapatkan pembiayaan.

Oleh karenanya, kajian kelembagaan PBMT Ventura sangat menarik untuk dilakukan. Begitu pula dengan akad perjanjian dalam penyaluran bantuan likuiditas yang tergolong *high risk*. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu antara PBMT Ventura dengan BMT mitra harus dapat melindungi kepentingan keduanya secara berimbang. Dimana sebagai perusahaan *lender of last resort*, PBMT Ventura juga memiliki kewajiban untuk menghindar dari wanprestasi, dan di sisi lain, BMT juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana bantuan likuiditas tersebut, walaupun BMT tersebut sedang berada pada kondisi yang *rush*.

³Budi Rahardjo, "PBMT Ventura" dalam, <https://www.slideshare.net/boedybralink/pbmt-ventura-70596024>, diakses tanggal 15 Maret 2017.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti PBMT Ventura dalam sistem Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia, dan juga mengenai akad kerjasama antara PBMT Ventura dengan BMT mitranya, sehingga kedua belah pihak dapat merasakan keuntungan atas dasar simbiosis mutualisme karena kepentingan keduanya dilindungi secara berimbang. Selain itu, sepanjang pengetahuan penulis belum banyak penelitian yang membahas mengenai hal tersebut, maka penelitian ini penting untuk dilakukan.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Demi mencapai hasil penelitian yang fokus dan terarah, penulis membatasi objek kajian penelitian ini yaitu pola perjanjian kerjasama (akad) yang dilakukan PBMT Ventura dengan BMT mitranya, dalam hal ini BMT mitra yang dimaksud adalah BMT Alfa Dinar Karanganyar dengan pertimbangan bahwa BMT Alfa Dinar Karanganyar telah cukup lama melakukan kerjasama dengan PBMT Ventura.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana posisi PBMT Ventura dalam sistem Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia?
2. Apakah pola kerjasama (akad) antara PT. Permodalan BMT Ventura dengan BMT Alfa Dinar Karanganyar sudah melindungi kepentingan kedua belah pihak secara berimbang?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua hal, yaitu teoritis dan praktis. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui posisi PBMT Ventura dalam sistem LKMS di Indonesia.
2. Mengetahui pola perjanjian kerja sama usaha yang dilakukan PBMT Ventura dengan BMT Alfa Dinar Karanganyar.

Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini dapat diformulasikan dalam hal-hal berikut:

1. Menambah pengetahuan mengenai Perusahaan Ventura Syari'ah.
2. Menambah wawasan tentang PBMT Ventura.
3. Referensi tentang Perusahaan Ventura bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
4. Masukkan positif bagi Pemerintah dalam penyusunan rencana strategis mengenai pengembangan regulasi bagi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan hubungan perusahaan ventura dengan lembaga keuangan mikro serta penelitian mengenai manajemen likuiditas oleh BMT sudah banyak dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensitas Penggunaan Dana Modal Ventura oleh UKM (Studi Kasus pada PT. Sarana Jateng Ventura)

merupakan tesis dari Universitas Diponegoro yang ditulis oleh Rilanto Arifin (2005). Penelitian ini menjelaskan bahwa modal ventura sebagai salah satu sumber pendanaan usaha yang relatif baru memiliki permasalahan-permasalahan, misalnya rendahnya intensitas penggunaan modal. Pendirian perusahaan modal ventura bertujuan untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan, khususnya bagi UKM, sehingga iklim usaha di Indonesia semakin kondusif. Rendahnya minat UKM untuk menggunakan modal ventura sebagai sumber pendanaan perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak, khususnya bagi perusahaan modal ventura dan pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya pendapatan usaha dan karakteristik pola pembiayaan memiliki pengaruh yang signifikan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis susun sebab objek analisisnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas penggunaan dana modal ventura oleh UKM, sedang penulis lebih menitik beratkan kepada pola kerjasama antara PBMT Ventura dengan BMT mitranya..

Pembiayaan Modal Ventura bagi Usaha Agribisnis (Studi Kasus di Kota Tarakan) merupakan tesis dari Universitas Gadjah Mada, ditulis oleh Fadhillah Rauf (2007). Tesis ini memaparkan mengenai aspek hukum pembiayaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) di Kota Tarakan. Ia menjelaskan bahwasanya Perjanjian yang dilakukan PT. Sarana Kaltim Ventura dengan PPU di Kota Tarakan dilakukan dalam bentuk pinjaman dan bukan dalam bentuk investasi, sedang fasilitas dana yang diberikan PT. Sarana Kaltim Ventura kepada PPU merupakan hutang jangka pendek. Imbalan jasa ditetapkan bukan dengan sistem bagi hasil tetapi dihitung berdasarkan bunga harian flat pertahun

serta risiko dibebankan sepenuhnya kepada PPU. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis susun karena memiliki objek kajian yang berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Aspek Yuridis Pola Kemitraan antara Pengusaha Kecil dengan Perusahaan Modal Ventura Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil merupakan skripsi yang ditulis oleh Irsan Ciputra (2014) dari Universitas Sumatera Utara Medan. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa unsur-unsur dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara lembaga pembiayaan modal dengan perusahaan yang dibiayainya di Indonesia seperti lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan UKM berpedoman pada PerPres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, PerMenKeu Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, dan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UKM, serta beberapa ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait. Persoalan utama bagi UMKM adalah modal, manajemen, dan teknologi. Adapun kriteria legal atas Perusahaan Pasangan Usaha haruslah berbadan hukum. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis susun sebab fokus utama dalam penelitian ini adalah aspek yuridis atas pola kemitraan pengusaha kecil dengan Perusahaan Modal Ventura.

Analisis Kegiatan Modal Ventura Antara Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usahanya (Studi pada PT.Bahana Artha Ventura) yang ditulis oleh Nurana Sekar Lestari dan Aad Rusyad Nurdin (2014) merupakan jurnal lepas Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan modal ventura pada PT. Bahana Artha Ventura terdiri dari

penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha terbagi dalam tiga skema yaitu modal kerja, investasi, dan pembiayaan modal ventura berjangka pendek. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian antara PT.Bahana Artha Ventura dan PT.X merupakan bentuk pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha dengan skema investasi. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang akan penulis susun jika dilihat dari fokus dan objek kajian penelitiannya.

Peran Perusahaan Modal Ventura Syariah dalam Mengembangkan UMKM (Studi pada PT.PNM Ventura Syari'ah) skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang ditulis oleh Dian Maryani (2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perusahaan modal ventura dalam mengembangkan UMKM. Dengan metode *Analytik Network Process* (ANP) didapatkan hasil sebesar 24% untuk kriteria prioritas produk, 19,3% untuk manajemen, dan 25,9% untuk peningkatan kualitas SDM. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang akan penulis susun karena merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menjelaskan peran perusahaan modal ventura.

Sedangkan penelitian yang berkaitan dengan manajemen likuiditas di BMT diantaranya :

Manajemen Risiko Likuiditas di BMT ABC Jawa Timur (2015) merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh Satria Agus Susilo dan Dina Fitrisia Septiarini, berkesimpulan bahwasannya dalam melakukan proses identifikasi risiko, BMT ABC Jawa Timur masih berpedoman kepada data historis dan didapatkan pola dari siklus tahunan yang ada. BMT ABC Jawa Timur menempatkan risiko

likuiditas berada pada kuadran 3 di mana frekuensi terjadinya kecil, namun dampak yang ditimbulkan besar. Dalam melakukan mitigasi risiko likuiditas, BMT ABC Jawa Timur memberikan perhatian lebih kepada langkah-langkah preventif agar risiko likuiditas bisa dihindari. Untuk melakukan pengawasan dan pengendalian risiko likuiditas, BMT ABC Jawa Timur mengadakan rapat rutin dengan seluruh jajarannya dan dibantu dengan teknologi informasi untuk bisa menjangkau semua cabangnya secara optimal dan efisien. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis sebab hanya menginventarisir cara BMT ABC di Jawa Timur dalam menghindari resiko likuiditas, sedangkan penelitian penulis lebih menitik beratkan kepada pola kerjasama sebagai bentuk manajemen resiko likuiditas yang telah dilakukan pada objek penelitian.

Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Aman Utama Jepara), sebuah jurnal dari Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara yang ditulis oleh Aan Zainul Anwar dan Edi Susilo (2015) memaparkan bahwasanya regulasi atau peraturan tentang manajemen risiko dan pengawasan pada lembaga keuangan mikro syariah berbadan hukum koperasi (BMT) masih minim serta masih sangat lemah, dan ini berbeda dari perbankan. BMT sebagai lembaga keuangan hanya mengandalkan pengaturan internal. Penelitian ini berkesimpulan bahwa manajemen risiko likuiditas di BMT Aman Utama Jepara dikelola secara tradisional oleh pengalaman sehari-hari dan juga kebutuhan anggota dalam siklus penarikan tabungan dan pengeluaran pembiayaan. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang akan penulis susun, sebab fokus kajian dalam penelitian ini adalah penerapan manajemen

resiko likuiditas di BMT Aman Utama Jepara. Objek penelitian ini pun berbeda dengan penelitian yang akan penulis susun.

Dari berbagai penelitian di atas, sejauh pengetahuan penulis, belum ada yang membahas mengenai posisi PBMT Ventura dalam Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah dan pola kerjasama yang dilakukan oleh PBMT Ventura dengan BMT mitranya, maka menurut penulis penelitian ini penting untuk dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Banyak teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*).⁴ Pernyataan ini mengindikasikan bahwa hukum haruslah dinamis dan mengikuti perkembangan hidup manusia, namun hukum harus tetap mengandung unsur kepastian. Beberapa ahli telah mendefinisikan teori hukum diantaranya :

- a. Hans Kelsen. Menurutnya, teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif. Teori hukum murni, maksudnya karena ia hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak bersangkutan paut dengan hukum. Sebagai teori, ia menjelaskan apa itu hukum, dan bagaimana ia ada.⁵

⁴ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, cet. ke 2, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 1

⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, cet. ke-6, penerj. Raisul Mustaqim, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008), hlm 1

- b. Lawrence M. Friedman mendefinisikan teori hukum sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain.⁶
- c. John D. Finch menyebutkan teori hukum yaitu sebuah studi yang meliputi karakteristik esensial pada hukum dan kebiasaan, yang sifatnya umum pada suatu sistem hukum yang bertujuan menganalisis unsur-unsur dasar yang membuatnya menjadi hukum dan membedakannya dari peraturan-peraturan lain.⁷
- d. Selanjutnya, seorang ahli hukum yang lain yaitu Van Apeldoorn memberikan luas cakupan dari teori hukum sebagai pengertian-pengertian hukum, objek ilmu hukum, pembuat undang-undang, dan yurisprudensi, serta hubungan hukum dengan logika.⁸

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya teori hukum tidak hanya menjelaskan hukum secara konkrit, namun juga persoalan yang mendasar dari hukum tersebut. Salah satu teori hukum yang terkenal adalah teori sistem hukum yang merupakan buah pemikiran dari Lawrence M. Friedman.

Menurut Friedman, pembahasan mengenai sistem hukum harus diawali dengan istilah sistem hukum itu sendiri. Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu, artinya, sistem memiliki awal mula dan batasan akhir serta memiliki perbedaan dengan sistem lainnya. Ia

⁶ Laurence M. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 1990), hlm. 1

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), hlm 87.

⁸ *Ibid.*, hlm 91.

merupakan suatu susunan atau catatan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan hukum, memiliki definisi yang beragam jumlahnya, sesuai dengan penggunaan cara pandang yang berbeda-beda. Namun dalam sebuah sistem hukum, biasanya hukum didefinisikan sebagai kumpulan norma-norma yang sakral. Namun ada pula yang melihat hukum sebagai peraturan atau norma yang tidak selalu sakral.⁹ Lebih lanjut, Friedman dalam bukunya yang berjudul *American Law* menyebutkan elemen-elemen dalam sistem hukum antara lain¹⁰:

- a. Struktur hukum (*legal structure*), menjelaskan bagaimana pranata hukum, aparat hukum, dan sistem penegak hukum menjembatani sebuah sistem hukum yang baik.
- b. Substansi hukum (*legal substance*), merupakan salah satu elemen dalam sistem hukum yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai berjalannya sebuah institusi hukum.
- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya masyarakat secara umum terhadap hukum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwasanya sistem hukum bila ditinjau dari strukturnya, lebih mengarah pada lembaga-lembaga (pranata-pranata), seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif dan bagaimana lembaga

⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, cet. ke -4, penerj. M. Khozim, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011), hlm 9.

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *American Law*, (Canada: Penguin Books Canada Ltd, 1984), hlm 5-7.

tersebut menjalankan fungsinya. Struktur hukum juga menentukan bagaimana hukum tersebut akan dilaksanakan. Dan bila ditinjau dari substansinya, sistem hukum diarahkan pada pengertian mengenai ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem. Sedangkan bila ditinjau dari budaya hukum, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik. Maka dari itu, kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Untuk lebih mendalami inti pemikiran dari teori Friedman, ia menggunakan analogi yang menggambarkan keberkaitan antara ketiga elemen dalam sistem hukum tersebut, yaitu dengan mengibaratkan struktur hukum sebagai sebuah mesin, dimana mesin tersebut bisa didapatkan dari sebuah pabrik yang bernama substansi hukum, dan budaya hukum adalah konsumen yang menggunakan mesin tersebut, yang akhirnya menentukan penggunaan mesin, apakah sesuai dengan petunjuk penggunaan yang telah ditetapkan pabrik atau tidak.¹¹

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Selama ini pandangan mengenai hukum cenderung menganggap hukum sebagai semacam

¹¹ *Ibid.*, hlm 7

kehidupan sosial yang independen, sehingga terdapat fakta yang terabaikan dimana struktur dan peraturan suatu hukum yang telah tertulis sebagai peraturan atau undang-undang terkadang berbeda dengan kenyataan yang ada. Inilah pentingnya sistem hukum, dimana institusi-institusi hukum berelasi dengan masyarakat.

2. Teori Kontrak (Akad)

Teori-teori dalam kontrak, banyak diperkenalkan oleh para ilmuwan, baik ditinjau berdasarkan prestasi kedua belah pihak, formasi kontrak, maupun teori dasar klasik dan teori liberal. Menurut Roscoe Pound, berbagai teori kontrak berdasarkan Prestasi Kedua Belah Pihak, diantaranya¹²:

- a. Teori Hasrat (*Will Theory*). Teori hasrat ini menekankan kepada pentingnya keinginan (*will* atau *intend*) dari pihak yang memberikan janji. Ukuran dari eksistensi, kekuatan berlaku dan substansi dari suatu kontrak diukur dari hasrat tersebut. Menurut teori ini yang terpenting dalam suatu kontrak bukan apa yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak tersebut, akan tetapi apa yang mereka inginkan.
- b. Teori Tawar Menawar (*Bargaining Theory*). Teori ini merupakan perkembangan dari teori sama nilai (*equivalent theory*) dan sangat mendapat tempat dalam negara-negara yang menganut system *Common Law*. Teori sama nilai ini mengajarkan bahwa suatu kontrak hanya mengikat sejauh apa yang dinegosiasikan (tawar menawar) dan kemudian disetujui oleh para pihak.

¹² Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.5-11

- c. Teori sama nilai (*Equivalent Theory*). Teori ini mengajarkan bahwa suatu kontrak baru mengikat jika para pihak dalam kontrak tersebut memberikan prestasinya yang seimbang atau sama nilai (*equivalent*).
- d. Teori kepercayaan merugi (*Injurious Reliance Theory*). Teori ini mengajarkan bahwa kontrak sudah dianggap ada jika dengan kontrak yang bersangkutan sudah menimbulkan kepercayaan bagi pihak terhadap siapa janji itu diberikan sehingga pihak yang menerima janji tersebut karena kepercayaannya itu akan menimbulkan kerugian jika janji itu tidak terlaksana.

Sedangkan empat teori yang mendasar berdasarkan formasi kontrak, diantaranya¹³:

- a. Teori kontrak *de facto*. Kontrak *de facto* (*implied in-fact*) dalah kontrak yang tidak pernah disebutkan dengan tegas tetapi ada dalam kenyataan, pada prinsipnya dapat diterima sebagai kontrak yang sempurna.
- b. Teori kontrak ekspresif. Bahwa setiap kontrak yang dinyatakan dengan tegas (ekpresif) oleh para pihak baik dengan tertulis ataupun secara lisan, sejauh memenuhi syarat-syarat syahnya kontrak, dianggap sebagai ikatan yang sempurna bagi para pihak.
- c. Teori *promissory estoppel*. Disebut juga dengan *detrimental reliance*, dengan adanya persesuaian kehendak diantara pihak jika pihak lawan telah melakukan sesuatu sebagai akibat dari tindakan-tindakan pihak lainnya yang dianggap merupakan tawaran untuk suatu ikatan kontrak.

¹³ *Ibid.*

- d. Teori kontrak *quasi* (pura-pura). Disebut juga *quasi contract* atau *implied in law*, dalam hal tertentu apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu, maka hukum dapat dianggap adanya kontrak diantara para pihak dengan berbagai konsekwensinya, sungguhpun dalam kenyataannya kontrak tersebut tidak pernah ada.

Sebagaimana teori-teori tersebut, dalam kontrak/akad syari'ah juga dikenal beberapa teori. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, kontrak/akad dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar yaitu *natural certainty contracts* dan *natural uncertainty contracts*¹⁴.

Natural certainty contracts adalah kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*). *Cash Flow* nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Kontrak-kontrak ini secara *sunatullah (by their nature)* menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya *fixed and predetermined*. Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak jual beli, upah mengupah, dan sewa menyewa. Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*). Jadi masing-masing pihak tetap berdiri sendiri, sehingga tidak ada pertanggungansan risiko bersama. Juga tidak ada percampuran aset A dengan aset B.

¹⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hlm 51.

Kontrak-kontrak *natural certainty* ini dapat diterangkan dengan sebuah teori umum yang diberi nama teori pertukaran (*the theory of exchange*).¹⁵

Sedangkan *natural uncertainty contracts* adalah kontrak/akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*). Tingkat *return* bisa positif, negative, ataupun nol. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak-kontrak investasi ini secara *sunatullah (by their nature)* tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed and predetermined*. Dalam kontrak bisnis ini pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung risiko bersama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. *Natural uncertainty contracts* ini dapat diterangkan pula dengan sebuah teori umum yang diberi nama teori percampuran (*the theory of venture*).¹⁶

a. Teori Pertukaran

Teori pertukaran terdiri dari dua pilar, yaitu objek pertukaran dan waktu pertukaran. Fiqih membedakan dua jenis objek pertukaran yaitu *'ayn (real asset)* berupa barang dan jasa dan *dayn (financial assets)*. Sedangkan berkaitan dengan waktu pertukaran, Fiqih membedakan dua waktu pertukaran yaitu *naqdan (immediate delivery)* yang berarti penyerahan dilakukan saat itu juga dan *ghairu*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm 52.

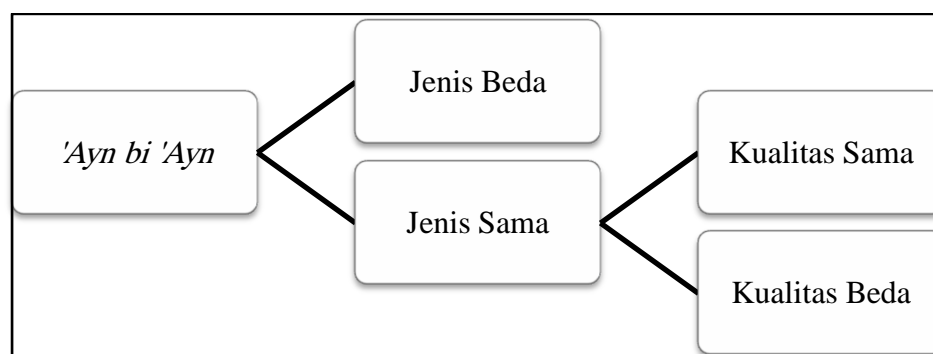
naqdan (deferred delivery) yang berarti penyerahan kemudian. Dari segi objek pertukaran, dapat diidentifikasi tiga jenis pertukaran, yaitu¹⁷:

- a. Pertukaran '*ayn* dengan '*ayn*.

Dalam pertukaran ini, bila jenisnya berbeda (misalnya upah tenaga kerja yang dibayar dengan sejumlah beras), maka tidak ada masalah (diperbolehkan). Namun bila jenisnya sama, fiqih membedakan antara *real asset* yang secara kasat mata dapat dibedakan mutunya dengan *real asset* yang tidak dapat dibedakan mutunya. Satu-satunya kondisi yang memperbolehkan pertukaran antara yang sejenis dan secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya adalah *sawa- bi sawa-* (sama jumlahnya), *mitslan bi mitslin* (sama mutunya), *yadan bi yadin* (sama waktu penyerahannya).

Di dalam hadist diberikan contoh barang-barang sejenis yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya, yaitu emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, jagung dengan jagung, dan garam dengan garam.

Bagan 1 : Pertukaran '*Ayn bi 'Ayn*

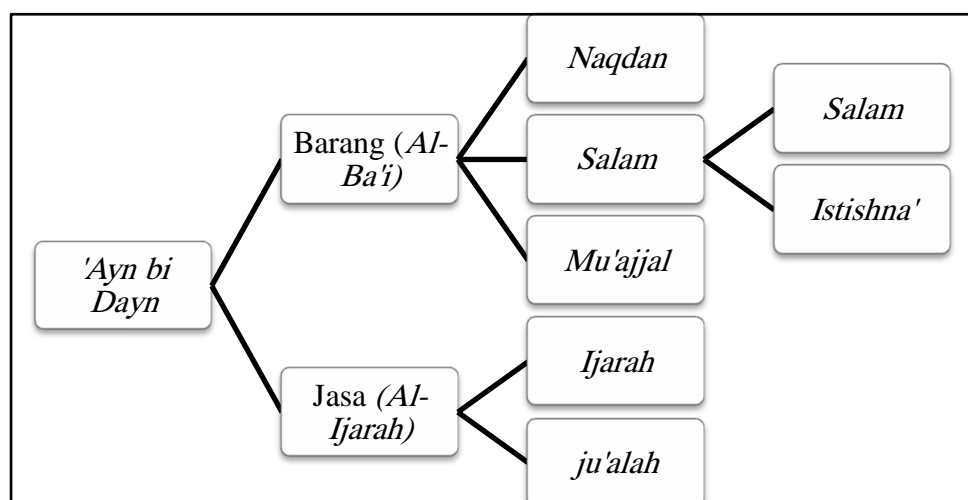


¹⁷ *Ibid.*

b. Pertukaran 'ayn dengan dayn.

Dalam pertukaran 'ayn dengan dayn, maka yang dibedakan adalah jenis 'ain-nya. Bila 'ayn-nya adalah barang maka pertukaran 'ayn dengan dayn itu disebut jual beli (*al-ba'i*). Sedangkan bila 'ayn-nya adalah jasa, maka pertukaran itu disebut sewa menyewa atau upah mengupah (*al-ijarah*). Dari segi metode pembayarannya, islam memperbolehkan jual beli dilakukan secara tunai (*now for now*), atau secara tangguh (*deferred payment, bai' muajjal*), atau secara tangguh serah (*deferred delivery, ba'i salam*). Jual beli tangguh serah dapat dibedakan lagi menjadi pembayaran lunas sekaligus di awal (*ba'i salam*) atau dilakukan secara cicilan dengan syarat harus lunas sebelum barang diserahkan (*ba'i istishna'*). Jual beli dapat dilakukan secara lazim tanpa si penjual menyebutkan keuntungannya. Namun dalam hal khusus, misalnya jual beli dilakukan secara *murabahah* maka si penjual menyebutkan keuntungannya.

Bagan 2 : Pertukaran 'Ayn bi Dayn



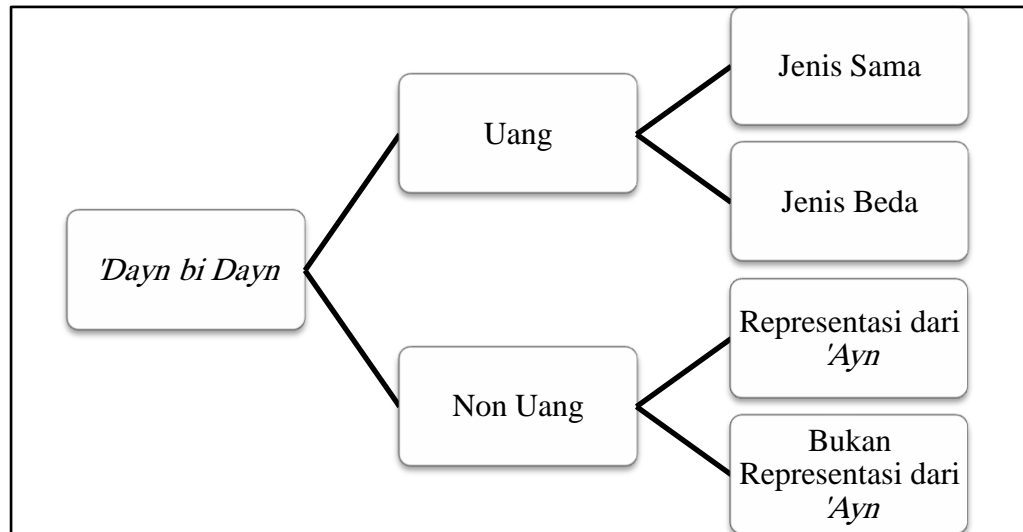
c. Pertukaran *dayn* dengan *dayn*.

Dalam pertukaran *dayn* dengan *dayn*, dibedakan antara *dayn* yang berupa uang dengan *dayn* yang tidak berupa uang (untuk kemudian disebut surat berharga). Pada saat ini, uang tidak lagi terbuat dari emas atau perak bahkan uang tidak lagi dikaitkan dengan nilainya dengan emas dan perak. Uang yang berlaku saat ini adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Yang membedakan uang dengan surat berharga adalah uang dinyatakan sebagai alat bayar resmi oleh pemerintah sehingga setiap warga negara wajib menerima uang sebagai alat bayar. Sedangkan akseptasi surat berharga hanya terbatas bagi yang mau menerimanya.

Pertukaran uang dengan uang dibedakan menjadi pertukaran uang yang sejenis dan pertukaran uang yang tidak sejenis. Pertukaran uang yang sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat *sawa- bi sawa-* (*same quantity*) dan *yadan bi yadin* (*same time of delivery*). Sedangkan pertukaran uang yang tidak sejenis hanya diperbolehkan jika memenuhi syarat *yadan bi yadin* (*same time of delivery*). Pertukaran uang yang tidak sejenis disebut *sharf* (*money changer*). Misalnya pertukaran USD 1000 dengan Rp 10.000,00 harus dilakukan penyerahannya pada saat yang sama. Inilah yang menjadi sebab pelarangan transaksi *forward* dan transaksi *swap* dalam pertukaran valuta asing. Sedangkan transaksi spot diperbolehkan, baik yang dilakukan di *counter* maupun yang dilakukan antar dua bank di dua lokasi yang berjauhan. Jual beli surat berharga pada dasarnya tidak diperbolehkan. Namun bila surat berharga dilihat lebih

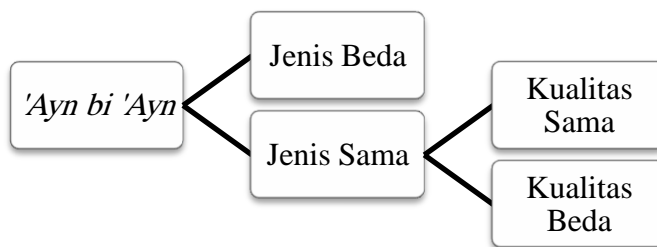
rinci, maka dapat dibedakan menjadi dua yaitu surat berharga yang merupakan representasi 'ayn, dan surat berharga yang tidak merupakan representasi dari 'ayn.

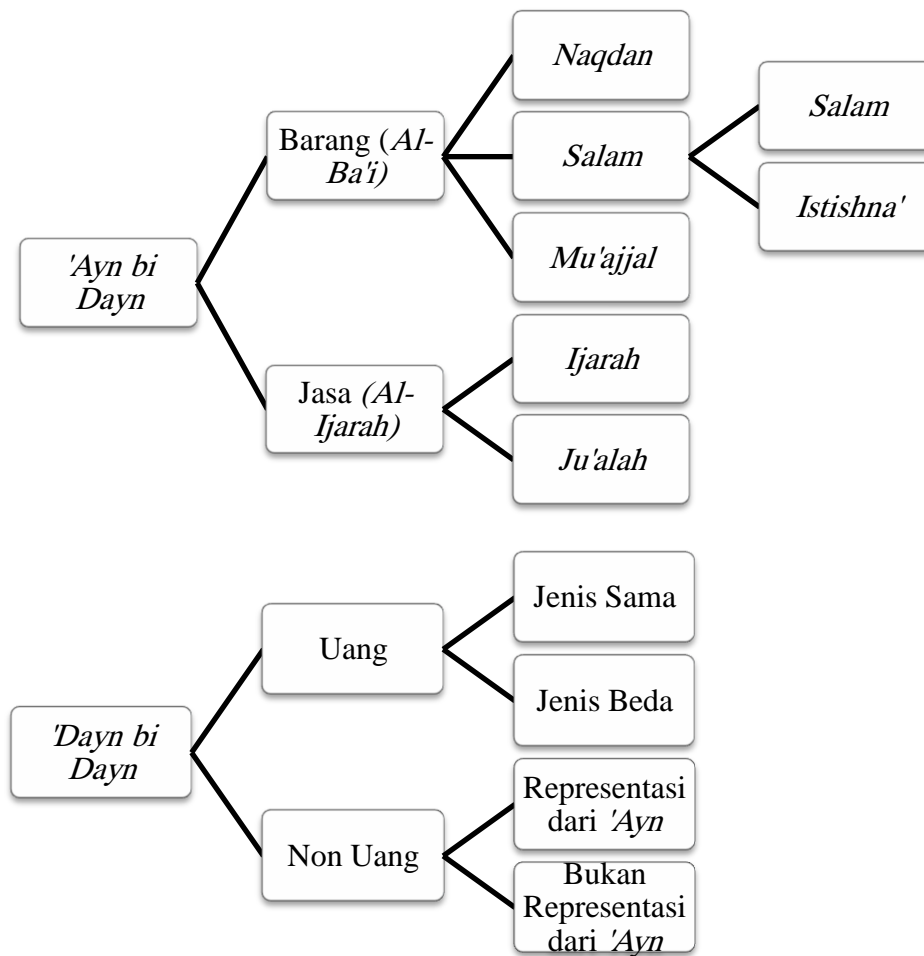
Bagan 3 : Pertukaran *Dayn bi Dayn*



Jika diikhtisarkan, maka teori pertukaran akan nampak seperti tabel di bawah ini:

Bagan 4 : Ikhtisar Teori Pertukaran





Skema di atas, dapat diringkas lagi ke dalam tabel di bawah ini¹⁸:

Tabel 1: Ketentuan Teori Pertukaran

<i>Object</i>	<i>Now for Now</i>	<i>Now for deferred</i>	<i>Deferred for deferred</i>
<i>'Ayn for 'Ayn</i>	☑	☑	☒
<i>'Ayn for Dayn</i>	☑	☑	☒
<i>'Dayn for Dayn</i>	☒ (kecuali <i>sharf</i>)	☒	☒

Dari tabel di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya semua pertukaran *dayn for dayn* diharamkan kecuali untuk *sharf* saja, begitu pula dengan semua transaksi *deferred for deferred*. Selain keduanya, semua transaksi pertukaran diperbolehkan.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 60.

2. Teori Percampuran

Teori percampuran terdiri dari dua pilar yaitu objek percampuran dan waktu percampuran. Objek percampuran dalam fiqih yaitu yang pertama adalah *'ayn (real asset)* berupa barang dan jasa dan yang kedua adalah *dayn (financial assets)* berupa uang dan surat berharga. Waktu percampuran juga dibedakan ke dalam dua waktu yaitu *naqdan (immadiately delievery)* yaitu penyerahan saat itu juga dan *ghairu naqdan (deferred delievery)*, yakni penyerahan kemudian.¹⁹ Selanjutnya, dari segi objek percampurannya dapat diidentifikasi tiga jenis percampuran, yaitu²⁰:

a. Percampuran *'ayn* dengan *'ayn*

Percampuran antara *'ayn* dengan *'ayn* dapat terjadi misalnya pada kasus dimana ada seorang tukang kayu bekerjasama dengan seorang tukang batu untuk membangun sebuah rumah. Baik tukang kayu maupun tukang batu sama-sama menyumbangkan keahliannya dan mencampurkan jasa mereka berdua untuk membuat usaha bersama, yakni membuat rumah. Dalam kasus ini yang dicampurkan adalah *'ayn* dengan *'ayn*. Bentuk percampuran seperti ini disebut *syirkah abdan*.

b. Percampuran *'ayn* dengan *dayn*

Percampuran antara *'ayn* dengan *dayn* dapat mengambil beberapa bentuk, diantaranya adalah *syirkah mudharabah* dan *syirkah wujuh*. Dalam kasus ini, uang (*financial assets*) dicampurkan dengan jasa/keahlian (*real*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm 61-63.

assets). Hal ini terjadi ketika ada seorang pemilik modal yang bertindak sebagai penyandang dana dan memberikan kepada seseorang yang memiliki kecakapan dalam berbisnis.

c. Percampuran *dayn* dengan *dayn*

Percampuran *dayn* dengan *dayn* dapat mengambil beberapa bentuk pula. Bila terjadi percampuran antara uang dengan uang dalam jumlah yang sama, maka hal ini disebut *syirkah mufawadhah*. Namun bila uang yang dicampurkan berbeda jumlahnya, maka hal ini disebut *syirkah inan*. Percampuran *dayn* dengan *dayn* dapat juga berupa kombinasi antar surat berharga misalnya saham PT.A digabungkan dengan saham PT.B.

Sebagaimana dalam teori pertukaran, maka dalam teori percampuran dapat pula dilihat dari tabel di bawah ini untuk menentukan halal haramnya dalam bertransaksi²¹:

Tabel 2: Ketentuan Teori Percampuran

<i>Object</i>	<i>Now for Now</i>	<i>Now for deferred</i>	<i>Deferred for deferred</i>
<i>'Ayn for 'Ayn</i>	☑	☒	☒
<i>'Ayn for Dayn</i>	☑	☒	☒
<i>'Dayn for Dayn</i>	☑	☒	☒

Dari tabel di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa semua transaksi tangguh serah (*now for deferred* dan *deferred for deferred*) diharamkan, sedangkan yang dihalalkan hanyalah transaksi yang dilakukan secara tunai.

Berdasarkan pemaparan teori-teori dalam akad syari'ah di atas, maka sangat jelas perbedaan antara teori-teori dalam kontrak secara umum dan teori

²¹ *Ibid.*, hlm 63.

dalam kontrak/akad syari'ah. Teori dalam kontrak/akad syari'ah diperlukan untuk memformulasikan sebuah akad yang sesuai dengan syari'ah ataupun mengevaluasi kontrak/akad yang baru ada disebabkan kompleksnya kegiatan ekonomi pada saat ini.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah metode untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis (*critical thinking*). Penelitian meliputi pemberian definisi dan redifinisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesis atas jawaban sementara, membuat kesimpulan dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati atas hipotesis.²² Berikut adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Metode dan Jenis Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian dibutuhkan adanya metode.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian riset lapangan (*field research*) yaitu mendapatkan hasil pengamatan lapangan secara langsung.²³ Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian khusus objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau cara kuantifikasi.²⁴ Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan

²² Mohamad Nazir, *Metode Penelitian*, cet. ke-5 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm 13.

²³ Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 11.

²⁴ M. Djunaidi Ghoniy, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke 2, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2014), hlm 25.

dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan yang dipakai dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidik.²⁶

3. Sumber Data dan Objek Riset

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer menggunakan data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau objek penelitian yaitu di PBMT Ventura Equity Tower Lantai 27 Jl.Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 dan BMT Alfa Dinar Karanganyar Jl. Lawu Tegal Asri Bejen Karanganyar Jawa Tengah.
- b. Sumber data sekunder, yang diperoleh dari data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, dokumen publik dan catatan-catatan resmi (*public documents and official records*), bahan kepustakaan seperti buku-buku,

²⁵ Imam Gunawan, *Method Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Edisi 1, Cet. Ke 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm 80.

²⁶ Muhammad Nazir, *Ibid.*, hlm 63.

literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas.²⁷

Sedangkan objek riset dalam penelitian ini adalah kelembagaan PBMT Ventura secara utuh dan menyeluruh dan juga pola kerjasama yang dilakukannya dengan BMT Mitranya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

- a. Observasi yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, peristiwa, waktu, tujuan, dan perasaan.²⁸
- b. Wawancara yaitu suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses Tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.²⁹

5. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Deduktif yaitu analisa yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum menuju hal yang bersifat khusus. Pengetahuan yang bersifat

²⁷ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), hlm 231.

²⁸ M. Djunaidi Ghoniy, *Ibid.*, hlm 165.

²⁹ Setyadin, dalam Imam Gunawan, *Ibid.*, hlm 160.

umum tersebut dijadikan atau titik tolak untuk menilai suatu kejadian yang khusus.³⁰

- b. Induktif yaitu analisa yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian berdasarkan itu diambil kesimpulan yang bersifat umum.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, jenis penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum mengenai lembaga keuangan mikro syari'ah (LKMS) yang terdiri dari pengertian LKMS, konsep akad dalam LKMS (BMT), dan asas-asas dalam akad syari'ah pada LKMS (BMT). Setelah itu, penulis ingin menjabarkan peraturan-peraturan yang mengatur LKMS (BMT) yang berisi peraturan kelembagaan dan peraturan operasional LKMS (BMT), dan yang terakhir mengenai kontrak bisnis dalam LKMS yang terdiri dari pengertian perjanjian kemitraan, akad-akad syari'ah dalam perjanjian kemitraan, keseimbangan dan proporsionalitas dalam kontrak, perjanjian baku, hukum jaminan, wanprestasi, keadaan memaksa, dan risiko.

Bab ketiga membahas mengenai perusahaan modal ventura syari'ah dan perkembangannya di Indonesia yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama mengenai perusahaan modal ventura syari'ah yang berisi pengertian, karakteristik,

³⁰ Lukman Hakim, *Methodologi Penelitian*, (Surakarta: UMS Press, 2004), hlm 6.

³¹ *Ibid*

dan dasar hukum dan perkembangan modal ventura syariah di Indonesia. Sub bab kedua membahas mengenai PT.Permodalan BMT Ventura, dan yang ketiga membahas mengenai hubungan kemitraan PBMT Ventura dengan BMT Alfa Dinar.

Bab keempat, berisi analisis dari rumusan masalah yaitu berkaitan dengan kelembagaan PBMT Ventura dan pola kerjasama PBMT Ventura dengan BMT Alfa Dinar.

Bab kelima, berisi mengenai kesimpulan dari penelitian ini dan juga saran penulis untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian dan pemaparan mengenai penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Posisi PBMT Ventura dalam sistem LKMS di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari struktur hukum (*legal structure*)

Pranata hukum, aparatur hukum, dan sistem penegak hukum yang menaungi PBMT Ventura adalah OJK, Kementrian Koperasi, DSN-MUI, Dewan Pengawas Syariah, dan PBMT Indonesia.

- b. Ditinjau dari substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum yang menjadi landasan berdirinya PBMT Ventura adalah segala UU terkait Perusahaan Modal Ventura dan UU terkait BMT, khususnya:

- i. UU Koperasi No 25 Tahun 1992 Pasal 41 ayat 2
- ii. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 30/PER/M.UKM/VIII/2007 tentang Petunjuk Tekhnis Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Lembaga Keuangan dengan Penyediaan Modal Awal dan Pendanaan melalui Modal Ventura
- iii. UU No 1 Tahun 2013 Pasal 14 tentang Lembaga Keuangan Mikro

- iv. UU No 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
- v. Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
- vi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

c. Ditinjau dari budaya hukum (*legal culture*)

PBMT Ventura telah menciptakan budaya hukum pembiayaan modal ventura yang baik berdasarkan pada beberapa hal, diantaranya :

- i. Pola pengawasan dan pembinaan yang dilakukan PBMT Ventura secara aktif kepada BMT mitranya.
- ii. PBMT Ventura berusaha memenuhi rukun dan syarat sah akad syari'ah dalam perjanjian yang dilakukan.
- iii. PBMT Ventura menitikberatkan analisis permohonan pembiayaan bukan hanya pada kemampuan bayar dan keberadaan jaminan, namun juga aktif melakukan analisis usaha sehingga pembiayaan *mudharabah muqayyadah* ini sarat dengan nilai investasi, bukan hanya hutang piutang.
- iv. Keberadaan *avalist* bukan hanya sebagai penjamin dalam perjanjian, namun juga merupakan salah satu upaya PBMT Ventura berkenaan dengan akad *mudharabah muqayyadah* yang tidak mewajibkan adanya jaminan (*kolateral*).

PBMT Ventura tidak memiliki kewajiban untuk membantu permasalahan likuiditas sebagaimana Bank Indonesia yang memiliki kewajiban menyalurkan bantuan likuiditas dalam lembaga keuangan Bank.

Namun, keberadaan PBMT Ventura dapat mengisi fungsi penguat likuiditas dalam LKMS yaitu sebagai *lender of the last resort* dimana saat ini belum ada yang dapat mengisi fungsi tersebut. Meskipun demikian, peran tersebut tidak bersifat mengikat. Artinya penyaluran dana dari PBMT Ventura dilakukan sesuai dengan permintaan pihak LKMS yang membutuhkan.

Dengan keberadaan PBMT Ventura, LKMS dapat semakin meneguhkan perannya memperkuat perekonomian nasional karena semakin banyak UMKM yang mendapat saluran permodalan dan pembiayaan, sehingga tenaga kerja terserap semakin baik, pengangguran berkurang, stabilitas ekonomi terjaga, dan mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat.

2. Pola kerjasama (akad) antara PBMT Ventura dan BMT Alfa Dinar Karanganyar sudah dapat melindungi kepentingan kedua belah pihak secara berimbang. Kewajiban-kewajiban yang diterapkan kepada pihak Alfa Dinar dikarenakan akad pembiayaan antara keduanya merupakan akad yang *high risk*. Namun, kompensasi berupa hak dan manfaat yang dirasakan oleh BMT Alfa Dinar juga sebanding dengan kewajiban yang harus ia penuhi.

B. Saran

PBMT Ventura merupakan salah satu perusahaan modal ventura syari'ah yang diharapkan dapat menjembatani kebutuhan keuangan syari'ah di masa yang akan datang. Bagi para pelaku kegiatan ekonomi kecil dan mikro, penelitian ini

diharapkan dapat menambah wawasan mengenai perusahaan modal ventura syari'ah yang saat ini belum begitu familiar di Indonesia, dan juga sebagai informasi mengenai kegiatan permodalan dan pembiayaan yang dilakukan oleh PBMT Ventura.

Adapun bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu mengimbangi regulasi-regulasi yang berkaitan dengan lembaga keuangan mikro syari'ah dan lembaga pembiayaan syari'ah non bank yang saat ini berjalan cukup pesat di Indonesia.

Dan untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperoleh data berkaitan dengan perkembangan LKMS (BMT) sebelum mendapatkan bantuan PBMT Ventura dan dibandingkan dengan keadaan LKMS (BMT) setelah memperoleh bantuan dari PBMT Ventura, untuk menjawab apakah peran PBMT Ventura sudah sangat signifikan terhadap perkembangan LKMS (BMT) di Indonesia. Selain itu, beberapa *subsidiary* PBMT Indonesia juga *researchable* dan menarik untuk dikaji lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Fikih dan Hukum

Anshori, Abdul Ghofur, Harahab, Yulkarnain, *Hukum Islam Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2008

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010

Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, cet.ke-2, Malang: UIN-Maliki Press, 2013

Friedman, Lawrence M, *American Law*, Canada: Penguin Books Canada Ltd, 1984

_____, *Sistem Hukum: Perpektif Ilmu Sosial*, cet. ke -4, penerj. Khozim, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011.

_____, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1990

Fuady, Munir, *Hukum tentang Pembiayaan : Dalam Teori dan Praktek*, cet.ke 2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999

_____, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, cet.ke 2, Jakarta: Kencana, 2013

_____, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga, 2013

_____, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001

Hartini, Rahayu, *Aspek Hukum Bisnis*, Malang: UMM Press, 2003

Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, cet. ke-6, penerj. Raisul Mustaqim, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008.

Musbikin, Imam, *Qowaidh al-Fiqhiyyah*, cet.ke 1, Jakarta : Raja Grafindo Persada,

Rahman, Hasanuddin, *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011

Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Wawan Mahwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011

Ekonomi:

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Press, 2011

Buchori, Nur S. *Koperasi Syari'ah Teori dan Praktek*, Banten: PAM Press, 2012

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke -3, Jakarta :Balai Pustaka

Dipo, Handoyo *Sukses Memperoleh Dana Usaha*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, cet.ke3, Jakarta: Prenada Media Grup, 2013

Huda, Nurul, Heykal, Muhamad, *Lembaga Keuangan Islam*, cet.ke 2, Jakarta: Prenada Media Grup, 2013

Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003

Mulia, Lia Sukma, *Perusahaan Modal Ventura*, Bandung: Penerbit Fakultas Hukum, 2008

Panggabean, Henry P, *Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan Baru untuk Pembatalan Perjanjian*, Yogyakarta : Liberty, 1999.

Ridwan, Muhamamd *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2014

Rivai, Veithzal dkk, *Islamic Financial Management*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010

Rustam, Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013

Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Intermedia, 1995

Simatupang, Richard Burthon, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet.ke-1, (Jakarta: Kencana, 2009

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Edisi-2, Cet.ke- 3, Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2005.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amallah : Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002

Susilo, Sri dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000

Tim PBMT Ventura, "Annual Report PBMT Ventura", Jakarta: 2014.

Van Greuning, Hennie, Bratanovic, Sonja Brajovic, *Analisis Risiko Perbankan*, penerjemah Ramdhan Adi, Jakarta: Salemba Empat, 2011

Penelitian

Ghoni, M. Djunaidi *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke 2, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2014

Gunawan, Imam, *Methodode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Edisi 1, cet. ke 2, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Hakim, Lukman, *Methodologi Penelitian*, Surakarta: UMS Press, 2004

Hasan, Iqbal, *Methodode Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

Nazir, Mohamad , *Methodode Penelitian*, Cet.ke 5, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006

II. REFERENSI PERUNDANG-UNDANGAN

Kep. Menkeu No 1251/KMK.013/1988 Pasal 9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura Pasal 1 ayat 2

Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2015, Pasal 5.

Peraturan Presiden Nomer 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1 ayat 3

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2013. Pasal 6

Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 1.

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomer 9 Tahun 1995 Pasal 8 Ayat 1 tentang Usaha Kecil

Undang-Undang Nomer Nomer 8 Tahun 1999 Pasal 18 tentang Perlindungan Konsumen

III. REFERENSI JURNAL:

- Hastuti, Luthfiyah Trini, “Urgensi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bagi BMT sebagai Bentuk Perlindungan Hukum kepada Nasabah BMT”, paper dipresentasikan dalam acara Seminar Nasional dan Silaturahmi Ekonomi Islam, di Hotel Sunan Surakarta, tanggal 26 November 2013
- Masyithoh, Novita Dewi, “Analisis Normatif Undang-Undang NO. 1 TAHUN 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)”, Jurnal Economica, Volume V Edisi 2, Oktober 2014
- Sholihah, “Problematisasi Badan Usaha Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat Kecil di Eks Karesidenan Surakarta”, paper dipresentasikan dalam acara Seminar Nasional dan Silaturahmi Ekonomi Islam, di Hotel Sunan Surakarta, tanggal 26 November 2013.
- Sakti, Ali, “Pemetaan Kondisi dan Potensi BMT, Kemitraan dalam rangka Memperluas Pasar & Jangkauan Pelayanan Bank Syariah kepada Usaha Mikro,” Jurnal al-Muzara’ah, Vol. I, No. 1, 2013
- Yulianti, Rahmani Timorita, “Asas- Asas (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah”, Jurnal Ekonomi Islam, La Riba Vol II, No 1, Juli 2008.

IV. REFERENSI ONLINE:

<http://news.liputan6.com>, diakses tanggal 15 Maret 2017

Kelana, Irwan, “OJK akan Revitalisasi Modal Ventura Syariah”,
<http://www.republika.co.id/berita/koran/urbana>, diakses tanggal 25
april 2017

Rahardjo, Budi, “PBMT Ventura” dalam, www.slideshare.net/boedybralink/pbmt-ventura-70596024, diakses tanggal 15 Maret 2017.

Rasyid, Abdul, “Sekilas tentang Perusahaan Modal Ventura
Syari’ah”, [http://business-law.binus.ac.id/2016/01/30/perusahaan-
modal-ventura/](http://business-law.binus.ac.id/2016/01/30/perusahaan-modal-ventura/), diakses tanggal 25 april 2017

Surat Keterangan
No. 001/SK/PBMT/III/2017

Bismillahirrahmanirrahim.

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Chairul Lubis
Alamat : Jl. Aseli Rt. 010/Rw. 001, Kelurahan/Desa Cipedak,
Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Jabatan : Manajer Operasional PT PBMT Ventura.

Menerangkan bahwa :

Nama : Fauzia Ulirrahmi.
NIM : 1520311016.
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum/Jurusan Hukum Bisnis Syariah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Benar telah datang ke kantor kami melakukan wawancara dan observasi pada tanggal 9 Maret 2017, untuk melengkapi bahan/data yang berkaitan dengan penulisan/pembahasan topik tesis yang berkaitan dengan PT PBMT Ventura.

Demikian kami sampaikan, jazakumullahu khoiron kastiron.

Jakarta, 9 Maret 2017


PBMT Ventura
PT Permodalan BMT Ventura
Chairul Lubis
Manajer Operasional



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT ALFA DINAR



Kantor KSPPS BMT Alfa Dinar :
Jln. Lawu No. 95 Tegal Asri, Bejen, Karanganyar
Telp/Fax (0271) 494416

Nomor : 131/SK-MG/AD-00/IV/2017

Perihal : Surat Keterangan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Alfa Dinar dengan ini memberitahukan bahwa :

Nama : Fauzia Ulirrahmi

NIM : 1520311016

Jurusan : Hukum Bisnis Syari'ah

Telah melaksanakan tugas akademik yaitu melakukan penelitian, guna mendapatkan data dan informasi dalam Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Thesis) yang berjudul "PT PERMODALAN BMT (PBMT) VENTURA SEBAGAI PENGUAT LIKUIDITAS BMT (STUDI KASUS PADA BMT ALFA DINAR KARANGANYAR).

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

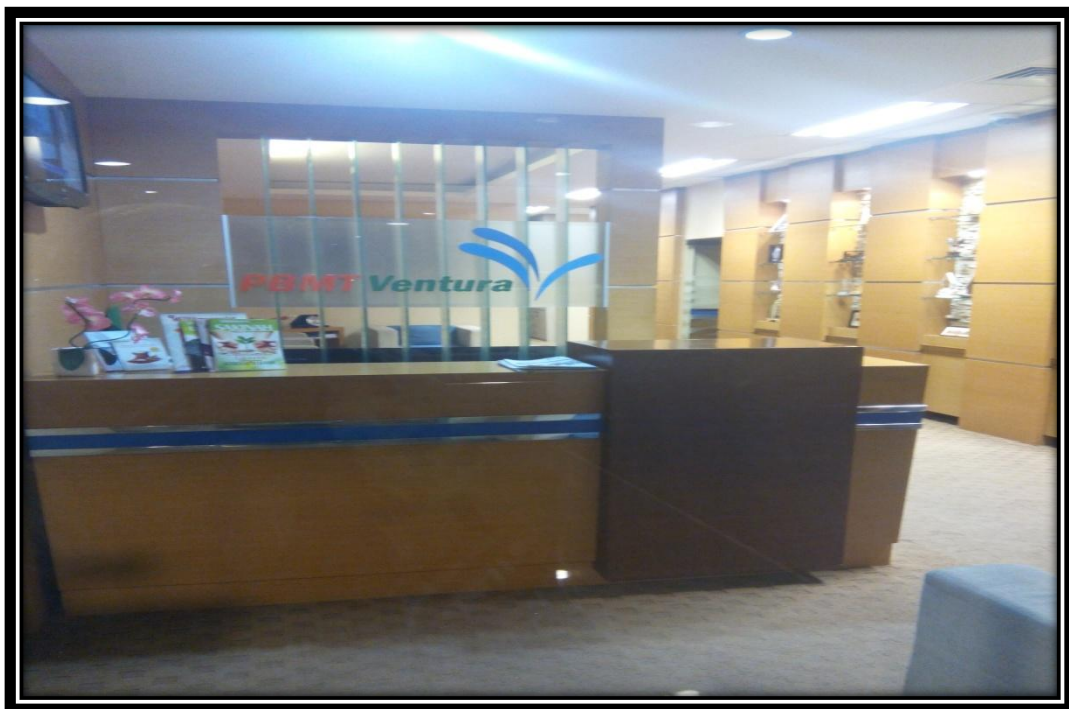
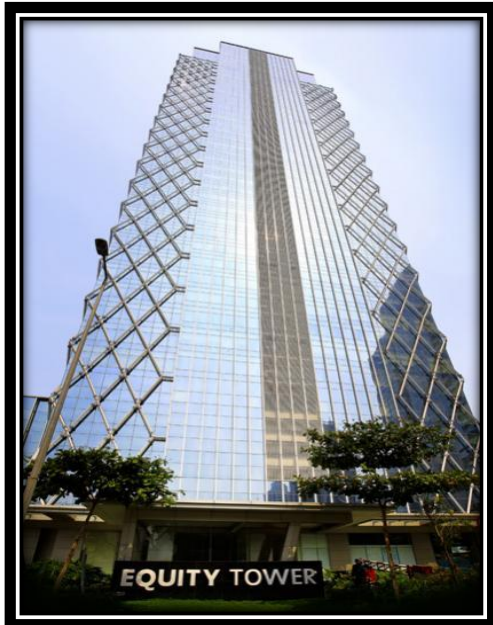
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Karanganyar, 20 April 2017
KSPPS BMT Alfa Dinar

Supri Hartono, SE
Pengurus

LAMPIRAN GAMBAR



Keterangan Foto :

Equity Tower merupakan komplek perkantoran mewah di kawasan Jakarta Selatan. Kantor PBMT Ventura berada di Equity Tower lantai 27.



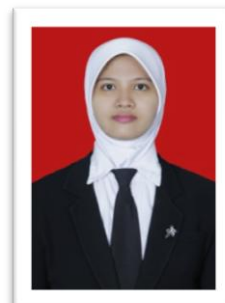
Keterangan Foto :

Bersama Bapak Supri Hartono selaku Dewan Pengurus BMT Alfa Dinar
Karanganyar

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Fauzia Ulirrahmi
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 10 Mei 1989
Alamat Asal : Jl. Jendral Sudirman No 53 Cilacap
Alamat Tinggal : RT 01 RW 01 Sukosari Jumantono Karanganyar
Email : fauziaulirrahmi6699@gmail.com
No HP : 085291351331



B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	TK Aisyah 03 Cilacap	1995
SD	SD plus Al-Irsyad Al-Islamiyyah 01 Cilacap	2001
SMP	ITTC Gontor for Girls 1 Mantingan Ngawi East Java	2004
SMU	ITTC Gontor for Girls 1 Mantingan Ngawi East Java	2007
S1	Prodi Mu'amallah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta	2012